

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanaha; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Darmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali*. Denpasar: PT. Upada Sastra.
- D, Mukti Fajar N dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group,
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta:Djambatan.
- Kartasapoetra, G, dkk, 1984. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa dan Suratman. 2013. *Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Urip 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui:Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijio. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharningsih. 2009. *Tanah Terlantar – Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Andrianto. *Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Majalah Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _Vol. XXIII No. 2_Desember 2018.
- Basrowi Dan Siti Juariyah. 2010. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development. Volume V No. 1 Februari 2014.
- Dewia, Putu Eka Dianita Marvilianti dkk. 2017. *Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal: 129-147, Desember 2017.
- Handayani, Sri. 2015. *Pendaftaran Hak Atas Tanah Asal Leter C, Girik Dan Petuk D Sebagai Alat Bukti Permulaan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Repetorium, Volume II Nomor 2 Juli-Desember.
- Khoiriah, Siti dan Utia Meylina. 2017. *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017.
- Kaharuddin. Abd. Kadir Adys dan Mappigau Samma. 2013. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Jurnal Otoritas, Vol. III No.1, April 2013.
- Larasati, Fadhila Restyana. 2016. *Kekuatan Hukum Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/B/2014/PT.TUN.SBY)*. Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 3.
- Risnawati, Dewi. 2017. *Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser Samarinda*. eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 5 no 1, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Ramadana, Coristya Berlian dkk. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.

Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, Artikel, 2010, Hlm 189

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

D. Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. *Kabupaten Boyolali Dalam Angka* 2018.
<https://boyolalikab.bps.go.id/publication/2018/08/16/9a969438a072865ae2c0b368/Kabupaten-boyolali-dalam-angka-2018.html>.
diakses pada 27 Mei 2019 pukul 07:16 WIB.
- Hariato, Sugeng P Dan Dewi Bainah Sari. *Biodiversitas Fauna Di Kawasan Budidaya Lahan Basah*. Artikel. Univeritas Lampung.
<Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/4352/1/Biologi%20konservasi%20gabung.Pdf>. diakses pada 2 April 2019 Pukul: 19:42 WIB.
- Komara, Eko Kurniawan dan Purnamasari Nurul. 2016. *Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Bagi Masyarakat (Telaah Kajian Manfaat Keberadaan BUM Desa 'Hanyukupi' Ponjong dan BUM Desa 'Sejahtera' Bleberan di Kabupaten Gunungkidul)*.
http://www.keuangandesia.com/wp-content/uploads/2016/05/MANFAAT-BUM-DESA-BAGI-MASYARAKAT_revised.pdf. diakses pada 23 Mei 2019 pukul 14:35.
- Merdeka.com. *Mendikbud Akui Wajib Belajar 12 Tahun Belum Maksimal*.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/mendikbud-akui-wajib-belajar-12-tahun-belum-maksimal.html>. diakses pada 11 Mei 2019 pukul 22:39 WIB.
- Yenny. 2019. *Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Tentang Penerapan Prinsip – Prinsip Good governance dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda)*. eJournal Ilmu Administrasi Negara,
[https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/EJOURNAL%20YENNY%20\(03-02-13-06-48-29\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/03/EJOURNAL%20YENNY%20(03-02-13-06-48-29).pdf). diakses pada 26 Mei 2019 pukul 08:19 WIB.

LAMPIRAN

1. Peta Desa Ngaglik Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

